



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 28, No. 2, Oktober 2014

ISSN - 0215-8809

- ☰ SEJARAH MANUSIA SEBAGAI SEJARAH PERADABAN: BELAJAR DARI FILSAFAT SEJARAH ARNOLD JOSEPH TOYNBEE
Sutarjo Adisusilo, J.R.
- ☰ NYAI DALAM PERGUNDIKAN: PENDORONG MUNCULNYA KAUM INDO DI HINDIA BELANDA
Hendra Kurniawan
- ☰ PENGGULINGAN PRESIDEN SOEKARNO DI BALIK PERISTIWA G30S
Yulius Dwi Cahyono
- ☰ INDIA-PAKISTAN PASCA KOLONIAL (1964-1975: SHASTRI-INDIRA)
B. Musidi
- ☰ FILIPINA DAN MASALAH SABAH
A. Kardiyat Wiharyanto

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

HISTORIA VITAE adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab/

Pemimpin Redaksi

Sekretaris Redaksi

Anggota Redaksi

: Dr. Anton Haryono, M.Hum.

: Hendra Kurniawan, M.Pd.

: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd.

Dra. Sumini Theresia, M.Pd.

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Yulius Dwi Cahyono, M.Pd.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Drs. B. Musidi, M.Pd.

REDAKTUR AHLI

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J., M.A. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dr. S. Nawiyanto Universitas Jember

SEKRETARIAT ADMINISTRASI

Junaidi Agus Sularto

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383

Telegram: SADHAR YOGYA

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	iii

<i>Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee</i>	107 - 135
<i>Sutarjo Adisusilo, J.R.</i>	

<i>Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda</i>	136 - 153
<i>Hendra Kurniawan</i>	

<i>Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S</i>	154 - 171
<i>Yulius Dwi Cahyono</i>	

<i>India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira)</i>	172 - 201
<i>B. Musidi</i>	

<i>Filipina dan Masalah Sabah</i>	202 - 214
<i>A. Kardiyat Wiharyanto</i>	

EDITORIAL

HISTORIA VITAE kali ini kembali menghadirkan lima artikel ilmiah dengan beragam tema. Diawali tulisan dari Sutarjo Adisusilo, J.R. yang mengkaji mengenai **Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee**. Tulisan berikutnya bertemakan Sejarah Sosial dari Hendra Kurniawan yang berjudul **Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda**. Berikutnya Yulius Dwi Cahyono menyajikan tulisan tentang Peristiwa 1965 dengan judul **Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S**.

Dua tulisan terakhir berasal dari dua orang dosen senior di Program Studi Pendidikan Sejarah. Tulisan B. Musidi memaparkan mengenai Sejarah Asia Selatan berjudul **India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira)**. Pungkasan, A. Kardiyat Wiharyanto kembali menambah pengetahuan kita mengenai Sejarah Asia Tenggara dengan menyajikan tulisan berjudul **Filipina dan Masalah Sabah**.

Akhir kata, selamat membaca dan terus berkarya.

Redaksi

**INDIA-PAKISTAN PASCA KOLONIAL
(1964 – 1975: SHASTRI – INDIRA)**

B. Musidi

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini ingin membahas sejarah India-Pakistan pasca Nehru (1964-1975). Dari pembahasan lewat studi pustaka diperoleh gambaran singkat sebagai berikut. Pakistan setelah gagal merebut Kashmir pada 1948, kembali melancarkan perang untuk merebut Kashmir dari India pada tahun 1965 tetapi gagal lagi. Alasan Pakistan untuk membangun negara berbasis agama tidak berhasil, bahkan lenyap setelah Pakistan Timur, dengan dukungan India, membangun Banglaesh (1972) lepas dari Pakistan Barat. India di bawah pimpinan Indira Gandhi telah gagal menjamin kelangsungan kepemimpinan Kongres secara berturut-turut sejak awal kemerdekaan pada tahun 1947 dan berakhir dengan jatuhnya Indira Gandhi pada tahun 1975.

ABSTRACT

This article discussed the history of Indo-Pakistani after Nehru era (1964-1975). From history research, it was found a short description as follow. After Pakistan failed to wrest Kashmir in 1948, Pakistan tried to wrest Pakistan from India again in 1965. The Pakistan's reason to build a state under the religius idea loosed after East Pakistan, with Indian support, established Bangladesh, detached from West Pakistan (1972). India, under the government of Indira Gandhi, had failed to guarantee the successive leadership of the Congres since 1947, since the beginning of the independence (1947), and ended by the falling of Indira Gandhi in 1975.

Keywords: India, Pakistan, pasca kolonial.

PENDAHULUAN

Berdirinya Liga Muslimin pada tahun 1906, merupakan titik awal perseteruan antara kaum Muslim India-Inggris dengan Kongres, yang oleh Muhammad Ali Jinnah dianggap sebagai organisasinya kaum Hindu. Hubungan antara Liga Muslimin dengan Kongres antara tahun 1906 - 1947 mengalami pasang surut. Usaha keras dari Mahatma Gandhi untuk menggalang kesatuan kaum Muslim dan Hindu mengalami jalan buntu, bahkan mengalami kegagalan dengan lahirnya Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947, dan diikuti dengan adanya perang pertama guna merebut Kashmir, bahkan Mahatma Gandhi menjadi kurban dari usahanya untuk menggapai kesatuan itu, ketika beliau pada tanggal 30 Januari 1948 ditembak oleh Nataram V. Godse, anggota aliran Hindu Orthodox, Rashtriya Svayamsevak Sangh. Pakistan untuk kedua kalinya melancarkan perang dengan India pada tahun 1965, sepeninggal Jawaharlal Nehru dan pada tahun 1971 terjadi lagi perang antara kedua negara bekas jajahan Inggris itu. Ketiga peperangan ini membuat Pakistan terpuruk dan impiannya untuk menyatukan kaum Muslim di bekas jajahan Inggris di Asia Selatan itu menemui kegagalan. Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk mencermati kelanjutan pergumulan antara kedua negara guna mewujudkan cita-citanya untuk mengangkat harkat dan martabat kedua bangsa sebagai bangsa yang merdeka, Pakistan dengan ideologi Islamnya, sementara India dengan ideologi kesatuan nasionalnya.

INDIA PASCA NEHRU

Sepeninggal Nehru, India diperintah oleh sebuah kepemimpinan kolektif di bawah P.M. Lal Bahadur Shastri (Kulke & Ruthermund, 1986, p. 321). Shastri mendapat dukungan penuh dari para koleganya baik itu di Majelis Rendah maupun di Majelis Tinggi (Lok Sabha dan Radya Sabha) pada tanggal 9 Juni 1964. Ketika itu yang menjadi Presiden Kongres adalah Kumaraswami Kamaraj Nadar. Kamaraj telah bekerja erat dengan Nehru menjelang wafatnya. Pada tahun 1963, Presiden Kongres memperkenalkan *Kamaraj Plan* dalam rangka untuk revitalisasi Kongres, dengan cara mengerahkan para menteri kabinet pusat yang berpengaruh,

begitu juga para menteri negara bagian untuk mundur dari jabatan guna berkiprah pada lapis terbawah masyarakat guna mendukung partai di tingkat pedesaan. *Kamaraj Plan* merupakan modifikasi nasehat Gandhi meski sudah amat terlambat dalam karir Nehru. Para pengamat melihat *Kamaraj Plan* sebagai usaha untuk menyingkirkan Morarji Desai dan mengorbitkan Indira Gandhi.

Karir politik Indira Gandhi dirintis lewat Pemuda Kongres, di samping itu Indira Gandhi sudah berkeliling dunia bersama almarhum ayahnya. Pada Kabinet Shastri, Indira diberi kedudukan sebagai menteri penerangan dan penyiaran. Posisi ini ternyata amat menguntungkannya karena dalam posisi itu ia dapat mempertinggi bayangan publiknya dengan cara memberinya kesempatan guna mengunjungi berbagai sudut India. Indira juga memperoleh kesempatan untuk mencermati berbagai hal yang bernilai dalam media, penyebaran informasi, dan kontrol dalam masyarakat modern. Sementara itu Morarji Desai dengan sia-sia berjuang untuk memperoleh dukungan Kongres dalam usahanya untuk menggantikan Nehru.

Kepemimpinan kolektif (Mahmud, 1988, p. 274) merupakan gabungan para menteri utama dalam kabinet: Neelam Sanjiva Reddy dari Andhra menjabat menteri urusan baja dan pertambangan (sebelumnya adalah presiden Kongres dan menteri utama Andhra, Juru Bicara dalam Lok Sabha dan Presiden India pasca 1977), Jestwan B. Chavan dari Maharashtra, tetap menduduki posisi sebagai menteri pertahanan. Swaran Singh dari Punjab diangkat menjadi menteri luar negeri setelah terbukti dapat menjadi juru runding melawan Bhutto dari Paksitan atas Masalah Kashmir. P.M. Shastri menjadi kurban perang tahun 1965 dengan Pakistan.

PERANG KASHMIR II (1965)

Dalam kurun waktu 15 tahun pasca merdeka Pakistan dilanda oleh pergolakan dan ketidakstabilan politik. Mohammad Ali Jinnah meninggal pada tanggal 1 September 1948. Pergolakan di Pakistan meliputi pertikaian propinsi dan ketidaksepakatan ideologi yang menderanya sehingga terpisah sebelum konsensus tercapai atas sebuah konstitusi.

P.M. Liaquat Ali Khan dibunuh di Rawalpindi, markas besar Angkatan Perang pada tanggal 16 Oktober 1951. Diduga bahwa kaum orthodox tidak puas terhadap modernisasi sekular Liaquat, sehingga mengilhami sentimen separatis Afghan-Pathan di North West Frontier Province, seperti tuntutan perang untuk pembebasan Kashmir dari pendudukan India ke bawah kekuasaan Pakistan. Pasca terbunuhnya Liaquat, awalnya Pakistan diperintah oleh para birokrat sipil seturut tradisi Inggris dan pasca tahun 1958 di bawah keadaan darurat militer. Tidak seorangpun dari para birokrat atau para politisi yang berkuasa di Karachi memperoleh sebuah formula guna memecahkan masalah-masalah konstitusional, yaitu melibatkan rakyat Pakistan Timur untuk ambil bagian kepemimpinan perwakilan tanpa menggeser kepemimpinan nasional Punjab Barat dan Sindh, atau bagaimana mengatur sebuah republik modern tanpa kehilangan dukungan para pemimpin Islam Orthodox atau para pengikut mereka. Ketegangan dan frustrasi politik serta kegagalan dalam usaha pemecahan permasalahan itu demikian melemahkan pemerintah pusat Pakistan sehingga memberi jalan untuk *coup d'état* pada tahun 1958. Pimpinan *coup d'état* adalah Jendral Muhammad Ayub Khan dari Panglima Angkatan Perang Pakistan menjadi Perdana Menteri dan kemudian Presiden dan Panglima Tertinggi.

Dalam Era Perang Dingin tahun 1950-an, Pakistan bergabung ke *John Foster's Dulles' Western Bloc Chain*, sebuah persekutuan militer yang dibangun guna membendung Komunisme. Di samping itu juga menjadi anggota CENTO (*Central Treaty Organization*) dan SEATO (*Southeast Asian Treaty Organization*), Pakistan memperoleh bantuan pengembangan ekonomi dan militer dari pihak Amerika Serikat. Ayub beranggapan (Barnds, 1972, p. 191) bahwa meskipun pasukan Pakistan jumlahnya lebih kecil dari pasukan India, tetapi dengan tank-tank Patton dan jet-jet F.86 maka pasukan Pakistan akan lebih unggul dari pada jumlah pasukan India di lapangan. Ayub telah mempekerjakan Zulfikar Ali Bhutto dalam rangkaian pembicaraan tingkat menteri guna mencari penyelesaian diplomatik dengan pihak India atas masalah Kashmir, sebelum melepaskan senjata-senjata baru miliknya. Usaha PBB menemui jalan buntu setelah pihak Pandit Jawaharlal Nehru menolak pelaksanaan

India-Pakistan Pasca Kolonial (B. Musidi)

plebisit sampai Pakistan mengosongkan seluruh pasukannya dari Azad Kashmir.

Menjelang meninggalnya Pandit Jawaharlal Nehru, hubungan India-Pakistan makin tegang dan sementara itu Ayub dan Bhutto sibuk membangun hubungan baik dengan Cina. Persenjataan Amerika Serikat yang diperbantukan ke India (akibat masalah perbatasan antara India dan Cina) membantu New Delhi mengerahkan dan melatih sepuluh divisi gunung, besarnya hampir dua kali lipat dari jumlah pasukan India yang ada.

Perang India-Pakistan diawali pada permulaan tahun 1965 (Ganguly, 1986, p. 83) di Rann of Kutch yang membentang hampir 200 mil panjangnya di sebelah selatan perbatasan India dengan Pakistan Barat. India menuduh patroli ilegal Pakistan pada garis bujur 24 derajat milik India. Pakistan menembaki dan membersihkan pos luar itu dengan tank-tank Patton. India menuduh Pakistan menggunakan Rann of Kutch sebagai tempat uji coba persenjataan yang diperoleh dari pihak Amerika Serikat yang baru guna melawan India. Ayub pada tanggal 30 Juni mengusulkan gencatan senjata di bawah pengawasan PBB. Pada bulan Agustus-September pusat konflik dan kancah konfrontasi pindah ke utara, yaitu wilayah Kashmir dan Punjab.

Misi penjaga perdamaian di Kashmir melaporkan terjadinya peningkatan pelanggaran terhadap gencatan senjata. India menuduh Pakistan menyelundupkan gerilyawan-gerilyawan terlatih memasuki dan melemahkan Kashmir guna menyiapkan invasi berikutnya. Para pengamat PBB melaporkan orang-orang bersenjata menyeberangi garis gencatan senjata dari Azad Kashmir ke bagian Jammu Kashmir yang diduduki India. Sementara itu Radio Pakistan melaporkan adanya perang pembebasan spontan melawan imperialis India yang tiba-tiba meletus di Kashmir. Pada tanggal 14 Agustus India mengirim pasukannya menyeberangi garis gencatan senjata untuk mengusir pasukan Pakistan dari Uri-Poonch. Kesatuan-kesatuan reguler Pakistan menyeberangi garis gencatan senjata di sektor Chhamb pada tanggal 1 September 1965. Menjelang tanggal 6 September, India melancarkan perang tank menuju Lahore. Pasukan Pakistan baik yang ada di Kashmir maupun Lahore

terdesak. Pada tanggal 23 September, ketika gencatan senjata PBB disetujui oleh pihak India dan Pakistan, kedua pihak telah kehabisan amunisi sebagai akibat embargo Amerika Serikat yang diberlakukan pada awal peperangan. Perang India-Pakistan tahun 1965 dimenangkan oleh pihak India berupa pengendalian Lahore oleh pihak India. Bagi kedua negara peperangan ini membantu mengalihkan perhatian dari konflik-konflik dan masalah-masalah internal. Masing-masing pihak menjadi satu bangsa. Posisi negatif India atas India mengeras sebagai akibat keberhasilan perangnya. Shastri meminta Dewan Keamanan untuk menyatakan Pakistan sebagai aggressor, sementara Pakistan meminta keadilan.

P.M. Alexei Kosygin mengundang Shastri dan Ayub ke Tashkent dalam pertemuan tingkat tinggi guna mendiskusikan masalah-masalah timbal balik. Pertemuan puncak Tashkent diselenggarakan pada tanggal 4 – 10 Januari 1966. Dalam pembukaan pertemuan ini Shastri menekankan perlunya untuk tidak saling menuduh atas masa silam, tetapi pandangan baru ke depan. Perundingan intensif terjadi dan berakhir dengan persetujuan yang ditandatangani oleh Shastri dan Ayub pada tanggal 10 Januari 1966. Kedua belah pihak setuju untuk memulihkan hubungan normal dan damai, dan mendorong saling pengertian dan bersahabat antar kedua bangsa. Kedua belah pihak bersepakat (Barnds, 1972, p. 211) untuk mencari alternatif lain guna memaksakan dan menyelesaikan pertikaian lewat cara-cara damai, menarik kembali pasukan bersenjata tidak melewati tanggal 25 Februari 1966, ke posisi sebelum tanggal 5 Agustus 1965. Untuk selanjutnya hubungan antara kedua negara dilandasi pada prinsip tidak saling campur tangan dalam masalah-masalah internal masing-masing pihak. Keduanya juga sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik yang normal, dan mempertimbangkan langkah-langkah ke arah pemulihan hubungan ekonomi dan perdagangan, komunikasi, pertukaran kebudayaan. Shastri dan Ayub sepakat untuk memulangkan para tawanan, dan melanjutkan diskusi akan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengungsi, dan menciptakan kondisi-kondisi yang akan membuat orang pindah tempat. Itu berarti bahwa hasil perundingan ini menunda datangnya era baru buat

perdamaian, persahabatan, dan kerjasama Asia Selatan. Sebelum era itu tiba, Shastri meninggal akibat serangan jantung yang dideritanya pada saat-saat penandatanganan Persetujuan Tashkent.

PENGGANTI P.M. LAL BAHADUR SHASTRI

Perhatian India selanjutnya (Wolpert, 1989, p.) terpusat pada siapakah yang menjadi pengganti Shastri. Kursi perdana menteri diperebutkan oleh Indira Gandhi dan Morarji Desai. Dalam hal pergantian ini peran dari Presiden Kongres, Kamaraj, sangat menentukan. Kamaraj meyakinkan Morarji Desai agar merelakan kursi itu bagi Indira Gandhi, tetapi Morarji Desai telah merasa tua (69 tahun) untuk menunggu kesempatan lain yang menurut pendapatnya ia layak untuk jabatan itu. Indira Gandhi ketika itu baru berusia 48 tahun, seorang janda dan pengalaman administratifnya relatif sedikit. Pendukung Indira berasal dari kalangan kaum muda dan wanita sosialis berhadapan dengan seorang pemimpin konservatif, pemimpin industri India. Kamaraj memahami kelebihan dan kelemahan itu terlalu baik, tetapi bila yang terpilih adalah Morarji Desai, berarti ia tersingkir, sementara Indira orangnya rendah hati dan lembut. Pada tanggal 15 Januari Kamaraj mengadakan pertemuan Delhi. Pertemuan ini dihadiri delapan menteri dan mereka sepakat mendukung Indira Gandhi. Anggota Parlemen Kongres memberikan suara bagi Indira Gandhi (347 dari 551) dan pemungutan suara pada kedua mejelis memberi 355 untuk Indira dan 169 untuk Morarji Desai.

P.M. Indira Gandhi (Barnds, 1972, p.217) berjanji untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun ayahnya dan untuk menghormati jaminan-jaminan yang telah dibuat Shastri di Tashkent. Pemberontakan suku Mizo di Nagaland telah mengubah harapannya. Kegagalan panen akibat angin musim pada tahun 1965 yang menyebabkan terjadinya bencana kelaparan dapat mengancam pemilihan Indira bahwa keuntungan-keuntungan memilih seorang perdana menteri yang kosmopolitan secara efektif akan meminta bantuan pangan dan keuangan yang amat dibutuhkan dari luar negeri membuat pemilihan itu berjalan lancar. Indira Gandhi dalam hari kemerdekaan India, tanggal 26

Januari, berjanji bahwa bantuan pangan yang besar jumlahnya dari Amerika Serikat akan digunakan untuk mengatasi bahaya kelaparan itu. Pemerintah Demokrat di Washington secara konsisten membantu pemerintah India guna mengatasi bahaya kelaparan itu. Pada bulan Maret Indira pergi ke Washington dan memperoleh jaminan bantuan 12 juta ton gandum dan \$ 435 juta dalam bentuk pinjaman dan kredit untuk Pelita IV.

Dengan dukungan dana yang diperoleh dari Amerika Serikat Indira memulai Pelita IV (Barnds, 1972, p. 225). Modal dasar yang dimiliki India hanya sebesar \$ 314 milyar dan penduduk India sebesar 475 juta jiwa. Secara ekonomis ada perubahan yang berguna, misal penambahan tenaga listrik sebesar dua juta watt untuk jaringan nasional, percobaan berbagai bibit unggul di berbagai daerah, koperasi-koperasi pertanian di Gujarat sedang memproses susu, gula, dan komoditas lainnya. Kebanyakan dari 18.000 desa Madras telah memperoleh penerangan listrik dan 68 juta anak India sudah bersekolah. Pertumbuhan dalam kemampuan teknis tidak mungkin diukur, kendati tidak kalah pentingnya dalam menambah kualitas dan langkah perubahan sosial.

Pada bulan Juni 1966 Indira mengumumkan devaluasi rupee dari 4.76 menjadi 7.50 per dollar Amerika Serikat. Pihak oposisi menilai tindakan Indira ini (Barnds, 1972, p. 301) sebagai sebuah kegagalan perencanaan ekonomi India dan kapitulasi terhadap tekanan Amerika Serikat. Prestise pemerintah jatuh seiring dengan jatuhnya rupee, dan harus berjuang keras untuk memenangkan pemilu keempat. Bagi Indira devaluasi adalah untuk meningkatkan ekspor India agar dapat memperoleh devisa yang lebih besar. Betapapun pahitnya kebijakan ini harus ditempuh guna memperlihatkan keberanian kendati tidak populer. Popularitas Indira di dalam negeri naik dan memulihkan kembali impian kebebasan sosialisnya dan secara terang-terangan menolak peningkatan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Persekutuan Ayub-Chou mengacaukan kepemimpinan ayahnya di Dunia Ketiga dan semangat Tashkent menjadi pudar. Perkembangan dalam negeri dihadapkan pada suatu peningkatan kerusakan dan keributan pangan, seperti agitasi separatis bahasa dan agama di Punjab, di mana kaum Sikh

militan sedang memperjuangkan Punjab suba.

Kaum Sikh di Punjab memakai bahasa Punjabi, sementara kaum Hindu memakai bahasa Hindi. Kaum Sikh Punjab ini menuntut wilayah (Ganguly, 1986, p. 137) yang didasarkan pada mayoritas penduduknya orang Sikh yaitu separoh barat daya Punjab dengan bahasa Punjabi dan secara ekonomis lebih maju bila dibandingkan dengan kaum Hindu yang mayoritasnya beragama Hindu dan sebelah tenggara yang berbahasa Hindi dari daerah yang luasnya 47.000. Ibu kota Punjab baru adalah Chandigarh, juga dituntut oleh kaum Sikh. Sejak awal kemerdekaan mereka itu sudah menuntut otonomi. Akali Dal awalnya berjuang di bawah pimpinan Tara Singh, lalu San Fateh Singh. Pada bulan Desember 1960, ketika Tara Singh dipenjara, Fateh Singh memasuki politik Punjab dengan puasa lebih dari tiga minggu untuk Punjab suba. Arya Samaj dan Jan Sangh menyusun gerakan penyelamatan Hindu dan demonstrasi di wilayah Hindu Orthodox, wilayah Haryana. Ketika terjadi Perang India-Pakistan tahun 1965 San Fateh Singh setuju untuk menghentikan puasanya dan setelah gencatan senjata tuntutan partai akan ditinjau ulang. Pada tanggal 1 Desember 1966 berdirilah negara bagian Punjab dan Haryana, tetapi tidak sampai setelah puasa sampai mati oleh Darshan Singh Pheruman pada bulan Oktober 1969, diikuti oleh ancaman San Fateh Singh mengurbankan dirinya agar Chandigarh dijanjikan untuk negara bagian mayoritas Sikh Punjab sebagai ibu kotanya sendiri pada awal tahun 1970.

Pemilu IV diselenggarakan pada bulan Februari 1967, ternyata sangat menurunkan mayoritas pemerintahan Indira (Wolpert, 1989, p. 382) seperti yang diramalkan oleh para pengamat. Kementerian-kementerian non Kongres dibangun di Benggala Barat, Bihar, Madras, Orissa, Kerala dan Punjab pada akhir bulan Maret 1967. Pada bulan April kementerian yang dipimpin oleh Kongres begitu rapuh sehingga pemerintahan presiden harus dibangun. Kerusakan demikian meluas, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Kongres demikian dalam dan meresap, sehingga Kamaraj dengan sia-sia membangun kembali partai di atas kematiannya dengan menasehati Indira untuk mengundang Morarji Desai kembali ke Delhi sebagai pembantu perdana

menteri, sebuah jabatan yang diciptakan oleh ayahnya bagi Sardar Patel. Morarji juga menghendaki kementerian dalam negeri, menteri negara yang dipegang oleh Patel, tetapi Indira menolaknya dan sebagai pengganti diberi posisi menteri keuangan. Indira menerima rencana Kamaraj sebagai sebuah kompromi instink politiknya sendiri untuk kepentingan kesatuan partai yang diharapkan. Perkawinan politik ini tidak berhasil, dan Kongres tidak mampu mengubah dirinya sendiri seperti Gandhi yang sudah lama mendesaknya untuk dikerjakan, menghilangkan ambisi pribadi, ketamakan, dan kesenangan terhadap tujuan-tujuan nasional dan pelayanan umum, dengan kehilangan monopoli kekuasaannya pada tahun 1967, tepat dua puluh tahun pasca merdeka. Manifesto sikap partai oposisi kanan, kiri dan tengah, mengulangi tema yang membawa ketenangan negeri sekarang dalam keadaan kacau pada semua aspek kehidupan nasional.

Guna menghadapi golongan tua Indira mengambil sikap makin bertambah ke kiri. Indira menjadi yakin setelah Amerika Serikat mengirimkan kembali senjata dan suku cadang ke Pakistan untuk merebut kembali keyakinan rakyatnya dengan mengubah kebijakan-kebijakan pemerintahnya untuk segera mewujudkan pola masyarakat sosialis yang sudah dikerjakan oleh ayahnya dan Kongres satu decade silam. Ketika perlombaan senjata di Asia Selatan kembali mencuat, semangat Tashkent ditinggalkan, selanjutnya Indira menolak menandatangani perjanjian atas *Nuclear Nonproliferation* yang diusulkan di Geneva. India sudah sejak 1964 menyuling plutonium eksplosif pada perencanaan atomnya di Trombay.

Guna membuktikan tuntutannya menjadi negara sekuler terutama menjelang ketegangan-ketegangannya dengan pihak Pakistan, India memilih wakil presiden Muslim, Dr. Zakir Husein menjadi Presiden India pada tanggal 6 Mei 1967. Sebelum dipilih menjadi presiden Dr. Zakir Husain menjadi wakil rektor Universitas Aligarh selama 8 tahun berikut kemerdekaan India. Wakil Rektor yang baru, Varahagiri Venkata Giri, sebelumnya adalah organisator buruh dan industri untuk Madras, dan menteri buruh di New Delhi. Perpecahan dalam Kongres sudah tidak dapat dibendung lagi. Pemilu tahun 1969 menguak hilangnya dukungan

terhadap Kongres di UP. Benggala Barat, dan Bihar, sementara pihak oposisi makin kuat posisinya dengan cara menyerang kebijakan-kebijakan Kongres yang sudah ketinggalan jaman dan janji-janji yang tidak ditepati. Indira dengan teguh mempertahankan kebijakan pemerintahannya dan menjaga semua industri berat yang baru di bawah pengawasan publik. Presiden Husein meninggal pada tanggal 3 Mei, dan Wakil Presiden Giri menggantikannya sebagai pejabat presiden sambil menantikan pemilihan umum presiden.

Keretakan antara Indira dengan para pemimpin tua melebar. Indira, untuk sementara lebih menyukai Giri dan mendapat dukungan tambahan hanya dari Fahrudin Ali Ahmed, Muslim satu-satunya pada Dewan Parlemerter Pusat Kongres yang amat kuat, yang memilih Sanjiva Reddy, Juru Bicara Lok Sabha sebagai calon resminya. Pada bulan Juli, dalam pertemuan Kongres di Bangalore, Indira tidak mengungkapkan usul-usulnya untuk menasionalisasi perbankan di India, Indira memperkuat program *land reforms* yang keras, dan menempatkan program partai pada penghasilan perorangan dan milik pribadi, seperti pada keuntungan-keuntungan perusahaan. Kemudian Indira pada tanggal 16 Juli mengambil alih kementerian keuangan dan memecat Morarji Desai dari jabatannya dan Desai kemudian mengundurkan diri sebagai pembantu perdana menteri. Tiga hari kemudian Indira menasionalisasi empat belas bank besar India termasuk di dalamnya Bank Sentral dan Bank India dalam usahanya untuk mempercepat perkembangan dan berpengaruh penting bagi masalah kemiskinan dan pengangguran. Menangnya V.V. Giri menjadi presiden membuktikan bahwa P.M. Indira Gandhi lebih kuat dan lebih populer dari pada golongan tua Kongres yang menempatkannya dalam kekuasaan tiga setengah tahun sebelumnya. Itu berarti bahwa Era Kepemimpinan Kolektif sudah berakhir dan digantikan oleh Era Kongres Bersatu yang diawali oleh Indira Raj.

Kepiawaiannya menyingkirkan golongan tua Kongres telah mengantarkannya kepada pengusirannya dari Kongres karena indisipliner pada tanggal 12 November 1969 ke bawah bendera Kongres yang baru. Panitia Kerja (*Working Committee*) pecah menjadi Morarji Desai's

Organization (O) dan Indira's Requisition (R) dan masing-masing menyelenggarakan sidang-sidang terpisah di Delhi. Indira menguasai kesetiaan dan dukungan lebih dari dua ratus anggota di Lok Sabha, sementara Desai memperoleh 65 suara, cukup untuk memperoleh posisi sebagai oposisi, tetapi tidak dapat menjatuhkan pemerintah. Karena tidak memperoleh posisi sebagai mayoritas di Lok Sabha, Indira lalu membentuk sebuah koalisi sayap kiri nasional mencakup partai Komunis, DMK, dan Akali Dal. Partai-partai ini mendukung pengembangan ekonomi yang lebih cepat dengan meningkatkan pengawasan pemerintah. Morarji mendapat dukungan dari Swatantra dan Jan Sangh, tetapi kekuatan sayap kanannya jauh lebih kecil dari pada kekuatan pihak Indira.

MENUJU BERDIRINYA BANGLADESH

Ketika India makin ke kiri, Richard Nixon baru genap setahun menjadi Presiden Amerika Serikat, Panglima Tertinggi Ayub Khan telah mengambil sikap meletakkan Pakistan di bawah perlindungan Jendral Aga Mohammad Yahya Khan. Perang Vietnam terus berkecamuk dan komandan pasukan Pakistan didukung penuh oleh Washington, diimbangi menuju pembentukan Benggala Timur menjadi Vietnamnya sendiri. Pasca dua puluh satu tahun merdeka, jurang yang memisahkan sayap timur dan barat Pakistan makin lebar, perbedaan-perbedaan kultural makin dalam sejalan dengan perjalanan waktu. Pakistan Timur secara ekonomis terbelakang dan miskin, menopang lebih dari 55% dari 120 juta rakyat Pakistan di atas 15% dari seluruh wilayahnya, memperoleh kebanyakan dari devisa karena ekspor jutenya, kendati mendapat bagian yang lebih kecil dari dana pengembangan industri nasional dari yang didapat oleh Pakistan Barat. Dalam banyak hal Pakistan Timur adalah sebuah koloni dari Pakistan Barat, dikendalikan oleh para pegawai dari Punjab yang berpikir dan berbicara dalam bahasa Urdu dari pada bahasa Benggali dan menempatkannya di bawah keadaan darurat oleh angkatan udara dan tentara yang dilakukan oleh orang Pathan, Baluchi, dan Punjab yang dilatih di Sandhurst dan Pentagon. Impian Jinnah berupa integrasi nasional dikacaukan oleh rezim Ayub

yang menghancurkan oposisi rakyat dengan strategi penindasan dan intimidasi.

Mader-i-Milat (Ibu Bangsa) Fatimah Jinnah, saudari dari Mohammad Ali Jinnah, pada tahun 1964 dicari (Burki, 198, p. 58) untuk menghentikan diktator Keadaan Darurat dengan menjadi Presiden dari gabungan partai-partai oposisi Pakistan. Tetapi Konstitusi Ayub dengan *Basic Democracynya* dapat memenangkan Ayub. Kegagalan oposisi menunjukkan aspirasi demokrasi dan ketidakmampuan oposisi. Tetapi Konstitusi Ayub dengan *Basic Democracynya* dapat memenangkan Ayub. Kegagalan pihak oposisi menunjukkan kegagalan aspirasi demokrasi dan ketidakmampuan oposisi. Kendati demikian, Sheikh Mujibur Rahman, pemimpin Benggala dari *Awami League* yang populer menawarkan *Six Points Program* (Program Enam Butir) yang militan bagi partainya pada bulan Maret 1966, menuntut otonomi bagi Pakistan Timur kekuasaan-kekuasaan propinsi atas: pajak dana penghasilan, pengawasan atas perolehan devisa, militia yang terpisah atau kekuatan para militer, mata uang terpisah, tetapi dapat dipertukarkan dengan bebas, dan semacam parlemen pusat, pemerintahan federal yang dilaksanakan oleh sebuah badan pembuat undang-undang yang bertanggung jawab secara langsung dipilih oleh rakyat atas dasar pemilihan umum dewasa. Program Enam Butir Mujib menjadi program partai dari Bangladesh.

Di Pakistan Barat, Bhutto juga berusaha keras untuk mengerahkan oposisi terhadap rezim dari mana ia telah mengundurkan diri setelah Pertemuan Tashkent, dengan melancarkan *Pakistan People's Party* pada bulan November 1967 didasarkan pada sebuah sosialisme Islami di dalam negeri dan kemerdekaan atas Kashmir, dengan kerjasama Cina-Pakistan. Rezim Ayub (Burki, 198, p. 58) pada tahun 1968 menuduh Mujib dan delapan konspirator dengan pengkhianatan, dan pada tahun yang sama Bhutto dipenjarakan karena menghasut rakyat, terutama mahasiswa, untuk melawan undang-undang dan kerusuhan dengan mengambil jalan kekerasan. Tetapi sebagai pengganti oposisi, penindasan demikian justru menggerakkan kekacauan yang lebih besar dan kegelisahan rakyat, mendorong Ayub meninggalkan *Basic Democracynya* dan menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Yahya Khan. Bala bantuan diterbangkan ke

Decca beberapa hari sebelum keadaan darurat membungkam protes politik Benggali pada bulan Maret 1969. Nixon mengirim selamat dan salam kepada Yahya dan *The World Bank's Aid-to-Pakistan Consortium* memberi jaminan \$ 481 juta untuk tahun fiskal berikutnya.

Dengan dukungan dan nasehat dari Amerika Serikat, pada bulan Oktober 1969, Yahya mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilu pertama di Pakistan yang akan diadakan pada bulan Oktober 1970 dan berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada perwakilan rakyat terpilih. Semua tawanan politik segera dibebaskan, tetapi pada bulan Maret 1970, ketika Yahya memperkenalkan *Legal Framework Order* kepada rakyat, sambil menjelaskan aturan-aturan dasarnya bagi Konstitusi Pakistan mendatang, ia dengan tegas menolak pemisahan Pakistan Timur dari Pakistan Barat. Pada saat ini Yahya melancarkan Pelita IV Pakistan yang ambisius yang menjanjikan pengeluaran publik lebih besar dari pada Pakistan Barat, sebuah bukti bawa Pakistan telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu.

INDIA SELANJUTNYA

Pada saat yang sama India sudah memasuki Revolusi Hijau (Barnds, 1972, p. 299) berupa pengenalan benih gandum unggul dari Mexico (Sonora IV) dan padi dari Taiwan dan Philipina (Taichung Native I, Tainan III dan Ir 8) yang meningkatkan produk bijih-bijihan India sampai hampir 100 juta pada 1969, konsumsi rata-rata harian dari kalori di atas 2100 dan harapan untuk hidup naik menjadi 51 tahun. Revolusi di pedesaan yang mulai dengan lamban pada akhirnya telah memberikan panen yang melimpah. Tempo produksi juga maju, dengan mencatat di atas 7% pertumbuhan pada tahun 1969, yang membantu memperkecil pengangguran dan memberi pemerintah India berita-berita baik secara ekonomi yang perlu untuk konsolidasi dasar dukungan rakyatnya. Pelita IV yang direvisi dibawa ke Parlemen pada bulan Maret 1970 mengusulkan pengeluaran yang lebih besar di sektor pertanian dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk membedakan sumber-sumber yang lebih besar untuk mempercepat capaian-capaian yang dibuat dalam produksi makanan. Pada tahun 1970,

Indira mengambil alih kementerian dalam negeri, juga kementerian negara urusan tenaga atom dan perencanaan dan dengan cara itu mengambil tanggung jawab langsung bagi pemerintah pusat. Era Indira Raj adalah sebuah konsolidasi pemerintah pusat, dan tuntutan India akan kebebasan yang lebih besar dari Barat.

Pada bulan Juli 1970, bencana banjir membuat gelombang pengungsian ke sebelah barat untuk mencari makanan dan perlindungan di Benggala Barat. Di situ sudah lama menjadi pusat ketidakpuasan yang muncul karena tekanan-tekanan dan pengangguran, tetapi pada tahun 1970 buruknya suasana politik menyebabkan muncul sebuah kelompok sempalan yang amat keras dari kaum Komunis Mao Naxalites, setelah daerah Naxalbari di Benggala sebelah utara, di mana gerakan itu muncul. Dengan menolak pemilu dan pemerintah, Naxalite memakai pembunuhan sebagai taktik politik besar mereka, membunuh para pemimpin rakyat dan para pejabat dan mengubah kota Calcutta menjadi kota hantu. Masuknya para pengungsi Hindu dari Benggala Timur menambah kemacetan, kekerasan dan polusi Calcutta dan sekitarnya, sehingga Presiden India terpaksa mengambil laih tanggung jawab.

Kongres Indira mengusulkan RUU pada tahun 1970 untuk menghapuskan dana dan hak istimewa para raja yang sudah dipecat sejak India Merdeka. Di Lok Sabha, RUU itu mendapat dukungan dua pertiga, tetapi gagal di Rajya Sabha, dan Peraturan Presiden tidak mengakui hak para raja. Itu berarti sekali lagi Indira terbukti lebih kuat. Mahkamah Agung memenangkan Peraturan Presiden pada tanggal 15 Desember 1950. Beberapa menteri menolak untuk bekerjasama dengan *land reforms* yang diusulkan oleh Indira dan langkah-langkah lainnya diusulkan untuk membagi tanah dan sumber-sumber India menjadi lebih wajar.

BERDIRINYA BANGLADESH

Sementara itu di Pakistan pada tanggal 7 Desember, Liga Awami Mujibur Rahman memenangkan pemilu (Burki, 198, 59, cf. Ganguly, 1986, p. 115) di Pakistan Timur, 160 dari 162 kursi yang diberikan kepada Pakistan Timur dalam Dewan Nasional Pakistan, sedangkan di Pakistan Barat Bhutto juga memperoleh kemenangan. Yahya Khan tidak

siap untuk turun dan menyerahkan kekuasaan pusat kepada resim yang dikendalikan oleh orang Benggala. Bhutto pun tidak mau menerima Mujib sebagai perdana menteri. Dewan Nasional yang baru saja terpilih diharapkan bertemu pada tanggal 1 Maret 1971, tetapi Bhutto menuntut penundaan dan Yahya menyetujuinya. Awal bulan Maret Mujib mempersilahkan rakyat Pakistan Timur untuk melanjutkan kerusuhan. Yahya memberlakukan jam malam, dan beberapa hari kemudian berjanji untuk mengundang dewan pada tanggal 25 Maret.

Pada tanggal 1 Maret 1971, pemilu India ke V dimulai dan sebagai hasilnya Indira memperoleh kemenangan yang menentukan di Lok Sabha (350 dari 515 kursi) dan pihak oposisi diperkecil menjadi 16 anggota. Pemilu sudah membuktikan betapa kuat akar-akar demokrasi di India. Para lawan politiknya berslogan: *Indira Hatao* (Singkirkan Indira) sementara Indira: *Garibi Hatao* (Singkirkan Kemiskinan).

Tanggal 25 Maret 1971, pembicaraan selama seminggu (Burki, 198, p. 59) di Dacca antara Mujib, Bhutto, dan Yahya berhenti tiba-tiba ketika Bhutto dan Yahya kembali ke Pakistan Barat dengan meninggalkan Letnan Jendral Tika Khan dan 60.000 pasukannya. Pakistan Timur menyebut dirinya Bangladesh. Rakyat Pakistan Timur menunggu kemerdekaan di bawah petunjuk Penyatu Bangsa mereka (*Bangabandu*) Sheikh Mujibur Rahman. Sebelum tengah malam tiba pasukan Tikka Khan, dengan tank-tank meninggalkan barak-barak mereka dan bergerak menyeberangi Dacca untuk membuka tembakan pada asrama-asrama mahasiswa di kampus universitas dan bazaar tempat orang Hindu berkerumun sementara ribuan orang sedang terlelap tidur. Jam 01.00 Mujib ditawan dan dikawal dengan tank-tank dari rumahnya.

Tanggal 30 Maret India memohon kepada PBB, dengan mendesak agar skala penderitaan kemanusiaan demikian tidak hanya menjadi perhatian domestik Pakistan sendiri (Ganguly, 1986, p.118). Dalam sebulan hampir 1.000.000 orang Benggala melarikan diri dari Pakistan Timur, menyeberangi perbatasan-perbatasan rata-rata kurang lebih 60.000 orang per hari pada akhir bulan April. Bulan Desember 1971, banjir teror mengantar 10.000.000 orang yang putus asa, mencampakkan orang-orang dari rumah mereka di Bangladesh yang tercabik-cabik akibat

India-Pakistan Pasca Kolonial (B. Musidi)

perang menuju ke India, tetangga mereka. Ribuan pemuda Bangladesh bergabung ke dalam kelompok-kelompok gerilya dari *Liberation Force (Mukti Bahini)* yang memperoleh senjata dan dukungan dari pasukan India menyeberangi perbatasan.

Nixon tetap memasok senjata ke Pakistan. Bagi Pakistan Barat, peristiwa yang terjadi di Pakistan Timur adalah dampak dari komplotan India untuk memecahbelah bangsanya. Ketika laporan-laporan saksi mata tentang pertumpahan darah di Dacca, Chitagong, dan kota-kota Bangladesh lainnya di Amerika Serikat, Senator Frank Church dari Idaho dan Edward Kennedy dari Massachusetts bergabung dengan mantan Duta Besar Chester Bowles dan John K. Galbraith memimpin gelombang protres nasional melawan kekerasan militer Pakistan Barat dan kelanjutan dukungan terhadap Yahya yang sewenang-wenang dari Washinton dan Pentagon. Church mengingatkan koleganya di Kongres bahwa sumbangan militer sejumlah \$ 2 milyar dalam bentuk senjata yang diberikan kepada Pakistan sejak tahun 1954 diduga telah digunakan sebagai perisasi untuk melindungi Pakistan dari agresi Komunis bukannya untuk mengancam dan membunuh rakyatnya sendiri. Sementara Nixon dengan terang-terangan berbisnis dengan Yahya, Nixon dan Henry Kissinger, pada saat itu sedang memperkerjakan Yahya Khan sebagai perantara Asianya dalam merundingkan penyelesaian amat rahasia dengan Cina. Tanggal 8 Juli Kissinger terbang ke Rawalpindi dalam perjalanannya ke Paris, dan setelah berbicara dengan Yahya, keberangkatannya ditunda, diduga karena sakit perut. Itulah kunjungannya yang pertama dengan Chou untuk mempersiapkan kunjungan Nixon.

Tanggal 9 Agustus Indira menandatangani Dua Puluh Satu Perjanjian Damai, Persahabatan dan Kerjasama dengan Uni Soviet (Ganguly, 1986, p. 125), dengan menetapkan bahwa jika salah satu pihak diserang atau diancam, keduanya akan segera berkonsultasi untuk menghentikan ancaman demikian dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin perdamaian dan keamanan kedua belah pihak. Peristiwa itu merupakan dukungan besar yang diperolehnya menyongsong perang India-Pakistan yang ketiga. Akar-akar kerjasama

dan persahabatan India-Amerika Serikat dirusak oleh diplomasi Nixon dan kebijakan Non Blok Nehru, yang dalam kenyataan selalu bergantung pada bantuan Inggris dan Amerika dan kemauan baik dirongrong oleh putrinya yang memilih bersekutu dengan Uni Soviet.

Bulan September India harus membayar para pengungsi sebesar \$ 200 juta sebulan untuk kebutuhan makanan. Sementara perang India-Pakistan pada tahun 1965 hanya sebesar \$ 75 juta. Bulan Oktober ketika angin muson berhenti, kira-kira tiga ribu orang Benggali, Mukti Bahini terlatih, beraksi di seluruh wilayah Bangladesh, mengacaukan komunikasi, mengumpulkan intelijen, menteror para pejabat dan tentara Pakistan, melemahkan wilayah luar kota untuk pertempuran terakhir. Dengan sia-sia Yahya berjanji untuk mengundang Dewan Nasional pada tanggal 22 Desember dan merumuskan kembali Konstitusi. Tanggal 23 November Duta Besar Pakistan untuk Amerika Serikat mengadakan Konferensi Pers untuk melaporkan bahwa Pasukan India terdiri dari tiga divisi, didukung dengan persenjataan dan udara menyerbu Jessore, Rangpur, Chittagong Hill Tracts and Sylhet. Peperangan sedang berkecamuk.

Tanggal 3 Desember Kissinger (Ganguly, 1986, p. 133) mengundang *Special Action in the Situation Room of the White House*, melaporkan bahwa ia sedang memperoleh kabar buruk setiap setengah jam dari Presiden karena tidak tegas kepada India. Nixon menghendaki mendukung Pakistan dan memerintahkan Kissinger untuk menghentikan semua surat kredit India, seluruhnya sebesar \$ 99 juta pada saat itu, lainnya \$ 72 juta dari *Public Law 480 Credit*. Sorenya pesawat-pesawat terbang Pakistan menyerang dua belas lapangan terbang India sisi barat, termasuk Amritsar, Agra, dan Srinagar. Hari berikutnya pasukan India menghajar Pakistan dan Bangladesh. Dengan sungguh-sungguh di udara dan dukungan rakyat, India dapat bergerak ke timur dan bertahan di sektor barat. Bendera Bangladesh dikibarkan di setiap kota dan pedesaan ketika Angkatan Perang India menutup lingkaran besinya di sekitar Dacca. Tanggal 9 Desember di tengah-tengah seruan *Jai Bangla*. Enam hari kemudian, Kepala Staf India, Jendral Sam Manekshaw, secara pribadi menerima penyerahan Jendral Niazi Pakistan. Tanggal 15

India-Pakistan Pasca Kolonial (B. Musidi)

Desember, *Instrument of Surrender of All Pakistan Armed Forces* di Bangladesh ditandatangani, India mengumumkan gencatan senjata sepihak dan Indira menyampaikan kegembiraan kepada Parlemen bahwa Dacca adalah ibu kota bebas sebuah negeri merdeka.

Keberhasilan angkatan perang dan diplomasi dalam pembebasan Bangladesh merupakan mahkota *Indira Raj*, dan mempromosikan India menjadi kekuatan penyeimbang di Asia Selatan. Pakistan kehilangan separoh penduduknya, angkatan perang dan perekonomiannya berada di tepi jurang kehancuran, mitos persatuan Muslimnya hancur berantakan, daya tahannya merosot, impiannya untuk memenangkan Kashmir pupus seperti harapannya untuk merebut kembali Bangladesh. Tanggal 20 Desember Yahya mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan yang masih tersisa kepada Bhutto yang berjanji untuk membuat Pakistan yang baru menjadi makmur dan progresif. Bagi Bangladesh kemerdekaan hampir seperti tersiksa akibat banyaknya orang yang mati dan harus membangun demikian banyak, tetapi dari reruntuhan dilahirkan sebuah bangsa terbesar kedelapan dunia menjadi sebuah Republik Rakyat Bangladesh yang sekular. Tanggal 21 Desember Mujib membebaskan Bhutto, dua minggu kemudian diijinkan untuk meninggalkan Pakistan, kembali ke Dacca, tempat kelahirannya pada tanggal 10 Januari. Selanjutnya Mujib menjadi perdana menteri, sementara wakil Rektor Universitas Dacca menjadi Presiden Bangladesh. Tanggal 22 Desember jutaan pengungsi mengalir kembali ke Bangladesh dan pada tanggal 25 Maret 1972, ulang tahun pertama Bangladesh dan hampir semua dari 9.774.140 pengungsi kembali ke tanah air mereka.

Setelah perang usai India mengakui daerah sebelah timur lautnya (Ganguly, 1986, p.137) untuk mencoba menjamin pengawasan atas wilayah-wilayah perbatasannya dengan Cina dan Burma. Pada tanggal 21 Januari 1972, tiga negara bagian yang otonom ditambahkan ke Uni India (1) Meghalaya (dipotong dari Khasi, Jaintia, dan *Garro Hill of Assam's Shilong Plateau*; (2) Tripura (ibu kotanya Argatala) yang telah menjadi *Union Territories of Tripura*; (3) Manipur (ibu kotanya Imphal) *Northeast Frontier Agency*, sebelumnya disebut kembali Arunachal Pradesh (Dawn's Province), tetapi tetap sebuah kesatuan teritori di bawah

pengawasan administrasi langsung dari Delhi sampai tahun 1979. Daerah pegunungan Mizo dan Assam, sebelumnya yang berbatasan dengan Burma dan pusat pemberontakan Mizo ditempatkan di bawah pengawasan langsung Delhi sebagai *Union Territory of Mizoram*. Kerajaan Assam yang jarang penduduknya (tahun 1972 di bawah 15 juta jiwa) dipisah dari 65% wilayahnya oleh *Indira's Raj*. Pada tahun 1975 *Protectorate of Sikkim*, sebelumnya pintu gerbang ke Tibet dianugerrahi menjadi negara bagian India.

INDIA PASCA BERDIRINYA BANGLADESH

Partai Kongres memenangi Pemilu (Kulke & Ruthermund, 1986, 322-323, Cf. Barnds, 1972, p. 278) yang diselenggarakan untuk kursi-kursi dewan dari 21 negara bagian India pada bulan Januari 1972. Sindikat kelompok tua gagal menguasai perolehan suara di Surat, Gujarat. Dengan demikian Indira dapat melenggang ke depan dengan kebijakan sosialisasi pemerintah pusatnya dan maju lebih cepat. Pada bulan Agustus 1971 *Twentieth Fourth Amendment* memberi parlemen kekuasaan untuk mengubah *Constitutional's Fundamental Right*. Keputusan ini ditentang oleh kelompok keagamaan India Selatan utamanya hak-hak milik. Bulan Oktober 1971 Amendment yang disengketakan dibawa ke hadapan MA, dan pada bulan April MA mendukung Indira. Bulan Desember 1971 *Twentieth Fifth* dan *Twentieth Sixth Amendment* disahkan, yang berarti meniadakan kompensasi milik yang dinasionalisasi dan status istimewa raja. Para pengritik Indira menuduhnya menyerah kepada koalisi Komunis dan tekanan Moskow dengan menenggelamkan prinsip-prinsip demokratis untuk kelayakan politik. Indira membantahnya dengan tiada minoritas yang cinta diri dari kaum kapitalis kaya dengan memegang India sebagai sandera kepentingan monopolinya.

Indira melancarkan *land reforms* yang radikal guna menghapuskan kemiskinan (Barnds, 1972, p. 279, Cf. Kulke & Ruthermund, 1986, p.323), nasionalisasi banyak industri, termasuk tambang batu bara yang pada tahun 1973 ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah dan pemerintah pusat mengawasi penjualan bijih-bijihan. Masalah India yang

paling sulit dan berumur tua tidak dapat dipecahkan dalam setahun, dua tahun atau bahkan sepuluh tahun, jadi bagaimana populernya *Raj* yang memeranginya atau bagaimana radikal langkah-langkah pembaharuan. Para pejabat pemerintah itu juga memberi kewenangan untuk melaksanakan undang-undang baru yang keras adalah kepentingan tuan tanah yang akan menderita. Pajak-pajak yang berat atas keuntungan-keuntungan industri dan penghasilan kota atau kesejahteraan terus menerus dihindari tanpa menghiraukan moral oleh para bankir kota terutama dari partai Kongres. Nasionalisme tidak diperkecil lebih cepat dari pada kemiskinan. Anak Indira, Sanjay telah ditunjuk menjadi *top manager* dari industri manufaktur mobil India yang baru, yang membutuhkan waktu lima tahun untuk memproduksi mobilnya yang pertama, dari pada mengingat bahwa perdana menteri mereka adalah putri Nehru, juga masalah-masalah kecemburuan komunal, keraguan dan kebencian India secara berkala meletus di Gujarat, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar dan Maharashtra, hilang setelah malam berlalu, tidak juga konflik-konflik yang sama berbahayanya dan anti pati regional yang mengadu orang Tamil dengan Hindu, Bihari dengan Benggali, Gujarat dengan Marata. Karma dari sejarah pluralistik India yang ruwet akan berlanjut untuk mengantar hasil pada abad-abad mendatang.

India memasuki Pelita V pada tahun 1974 dengan tujuan menghapuskan kemiskinan (Wolpert, 1989, p. 394) percaya diri secara ekonomis. Dalam Pelita V ini diharapkan bijih-bijihan meningkat dari 114 juta ton (1973-1974) menjadi 140 juta ton pada 1978-1979. Dengan rakyat India mendekati 600 juta pada tahun 1975, pertumbuhan produksi makanan yang dramatis tidak akan menjadi kepercayaan diri, tetapi *Indira's Raj* sedang investasi lebih besar pada KB, yang menerima kira-kira \$ 400 juta selama Pelita IV dan dijadwal mendekati \$ 700 juta selama Pelita V. Investasi dalam industri sebesar \$ 10 milyar, begitu juga dalam tenaga listrik, Pelita V ini untuk menghasilkan antara 8% dan 10% lebih produksi industri per tahun, dengan maksud untuk memperluas lapangan kerja. Inflasi tahun 1973-1974 (krisis energi) ketika harga minyak India menjadi empat kali lipat, merongrong harapan para perencana India yang optimistik. Membaiknya hubungan India-Amerika

Serikat pada awal perang Bangladesh dan meningkatnya perdagangan dengan semua negara. Amerika Serikat membantu krisis ekonomi India. Pada akhir tahun 1973 Amerika Serikat melepaskan tuntutan \$ 2 milyar dalam *P.L. 480 Funds* sehingga New Delhi meluruskan kecondongan Washington kepada Pakistan.

India mengadakan percobaan nuklirnya yang pertama pada tanggal 18 Mei 1974. Menurut Indira, India tidak bermaksud menjadi negara bersenjata nuklir (Kulke & Rothermund, 1986, p. 324), tetapi negara nuklir. Ketika Cina pada tahun 1965 untuk pertama kalinya mengadakan percobaan nuklirnya yang pertama, India mengutuk tindakan itu sebagai sebuah langkah mundur dan meminta semua bangsa menghentikannya. Dengan demikian Cina tidak sendirian di Asia dan Pakistan menjadi was-was dengan masuknya India ke klub nuklir dunia. Delhi menolak untuk menandatangani *the United Nation's Test Bomb Resolution*.

Ketika padang pasir Rajasthan digoyang oleh ledakan bom atom, Bihar dan Gujarat digoyang oleh ledakan lain berupa protes buruh (Wolpert, 1989, p. 395) menentang inflasi yang berkepanjangan dan korupsi Kongres. J.P. Narayan mengantar sebuah koalisi yang berbasis luas menentang Kongres sebagai sebuah revolusi total. Adanya kekeringan di Gujarat selama dua tahun dan inflasi 30% per tahun menghabiskan tabungan dan kesabaran kelas menengah, guru-guru sekolah, kaum profesional seperti mahasiswa, Morarji melanjutkan puasa sampai mati untuk menjauhkan menteri Kongres, Chimambhai Patel yang korup, dan setelah pemerintahan presiden diumumkan pada bulan Februari 1974, ia melakukan puasa yang kedua menuntut pemilu baru. Kejengkelan dan kejiikan oposisi terhadap Kongres akhirnya mengantar kepada sebuah koalisi besar dari partai-partai non Kongres, *Janata Morcha (People's Party)*, di bawah pimpinan gabungan JP dan Morarji Desai. Tahun 1975 aliansi meliputi kelompok-kelompok sayap kiri radikal. *Maoist Communist* dan *Left Socialist Conservative Swatantra* dan *Communal Rashtriya Loktantrik Dal (National People's Party)* a *Jan Sangh Splinter Group* dan *extreme right wing Anand Mag (Path of External Bliss)* partai keras yang didirikan oleh Pemuja Tantra, Prabat Ranjan (Baba)b Sarkar pada tahun 1955. Pertengahan tahun 1974

sebuah pemogokan kereta api nasional mengancam untuk melumpuhkan ekonomi India, tetapi Indira tegas menghadapinya, dan pada bulan Januari tahun berikutnya Menteri Kereta Api Uni, L.N. Mishra diledakkan dengan keretanya di Samastipur dan segera setekah itu Hakim Agung A.N. Ray, hampir terbunuh di New Delhi.

Hakim Jag Mohan Lal Sinha pada tanggal 12 Juni 1975, mendapati Indira (Wolpert, 1989, p. 396) bersalah dalam kampanye melawan Raj Narain guna memperebutkan kursi parlemen empat tahun sebelumnya. Sebagai konsekuensi Indira dilarang melaksanakan atau memegang jabatan pemilihan dalam waktu enam tahun. Hari berikutnya pemilihan umum di Gujarat dimenangkan pihak oposisi koalisi Morarji Desai. Keduanya merupakan pukulan telak buat Indira, yang secara pribadi telah memberikan kesaksian dalam kasus Mahkamah Agung dan yang sudah kampanye di seluruh Gujarat buat partainya. Janata Morcha segera mengatur sebuah protes duduk di luar Rashtrapati Bhavan di New Delhi, mempersilahkan Presiden Ahmad untuk menembak perdana menteri yang tercemar. Para politisi di seluruh negeri, termasuk dari partainya sendiri dan banyak surat kabar kenamaan mendesak Indira untuk turun, pada akhirnya sampai Mahkamah Agung sempat mendengar permohonan kepastiannya.

Protes memuncak pada tanggal 25 Juni pada saat rapat umum oposisi diselenggarakan di Delhi diketuai oleh Morarji Desai dan dipanggil oleh JP yang mendesak para anggota polisi dan angkatan perang untuk bergabung dalam kampanye satyagraha nasional melawan korupsi dan tidak mentaati aturan-aturan ilegal yang dibuat oleh seorang pemimpin yang tidak dipercaya (Wolpert, 1989, p. 397). Pada hari berikutnya pasukan elite India dan Polisi Cadangan Pusat menahan semua pemimpin politik oposisi, termasuk JP yang berusia 72 tahun dan Morarji Desai yang berumur 79 tahun. Indira memimpin sidang kabinet pada pukul 06.00, dan ketika fajar merekah pada tanggal 26 Januari 1975, Presiden India mengumumkan sebuah keadaan darurat nasional, menunda semua hak sipil, sensor pers, menempatkan kesatuan-kesatuan bersenjata di tempat-tempat khusus, melarang pesawat terbang melintasi Delhi. Hal yang sama juga diberlakukan di Calcutta, Bombay, dan kota-

kota besar lainnya, para politisi, mahasiswa, jurnalis, dan pengacara dipenjarakan. Ribuan mahasiswa Bihar, Maharashtra dan Delhi ditawan.

Keputusan untuk memberkakukan keadaan darurat tidak mudah. Menurut Indira di depan Rajya Sabha, 22 Juli 1975, tetapi diambil ketika kekerasan dan ketidakdisiplinan mengancam keutuhan kehidupan bangsa. Memang ada pemogokan dan protes terhadap melambungnya harga-harga, pengelakan pajak lebih, korupsi dan kealpaan. Ada yang berlebihan dan ada yang berkekurangan, yang semuanya menaikkan harga-harga, pengelakan pajak lebih, korupsi dan kealpaan. Ada yang berlebihan dan ada yang berkekurangan, yang semuanya bermuara sebagai rasa tidak puas. Di samping itu para lulusan kolese tidak mendapat pekerjaan dan mereka inilah yang berada di depan barisan oposisi.

Indira kemudian mengumumkan 21 Program Pembaharuan lewat Radio India (Wolpert, 1989, p. 398, Cf. Kulke & Rothermund, 1986, p. 324). Isinya: satu menurunkan harga, dua sampai tujuh menuntut *land reforms* yang radikal termasuk penghapusan hutang dan penghapusan buruh tidak bebas, permohonan untuk membantu secara langsung ratusan juta petani yang terlilit hutang dan budak belian tidak bertanah pada dasar piramidal pertanian India. Butir delapan sampai sepuluh mengulangi pernyataan akan tujuan-tujuan pengembangan terutama di sektor tenun tangan dan pemenuhan kebutuhan sandang rakyat. Butir sebelas sosialisasi tanah-tanah perkotaan, butir dua belas dan tiga belas dipusatkan pada pengelakan pajak dan meminta pengambilalihan milik penyelundup, butir keempat belas mencegah penyalahgunaan ijin, dan butir kelima belas dan dua puluh, perhatian yang lebih besar kepada para buruh dalam pekerjaan dan pelatihan, juga perkumpulan mereka dengan industri. Ada satu ijin nasional untuk transport jalan dan perbaikan pajak pendapatan untuk kelas menengah, dan dua butir menjanjikan harga-harga yang diawasi untuk para mahasiswa di tempat-tempat mereka kost, berikut buku-buku dan alat tulis. Lewat program itu Indira berjanji terhadap segmen penting dalam masyarakat India, terutama yang amat vokal terhadap partainya, elite intelektual muda. Para pegawai mentaati jam kerja, yaitu jam 09.00, sebelumnya paling cepat jam 10.30. Para penyelundup dan penghindar pajak dengan cepat menyatakan bahwa

Madam melaksanakan programnya. Dalam tempo sebulan harga bijih-bijihan dan gandum turun 5%. Presiden Kongres Dev Kant Barooah dari Assam menyatakan bahwa India adalah Indira dan Indira adalah India.

Tanggal 4 Juli, 21 organisasi politik (Wolpert, 1989, p. 399), mewakili kekuatan sayap kanan dan kiri ekstrim untuk kekuasaan Kongres (R), *Indira's Requisition Party* dilarang di bawah keadaan darurat dan sensor yang keras diberlakukan atas laporan-laporan pers asing dan domestik sebelum akhir bulan Juli, Indira mengundang kembali Parlemen guna mempertimbangkan usulnya untuk memperluas keadaan darurat tanpa batas. Perdebatan berlangsung singkat. Mayoritas di Lok Sabha (336:59) mendukung, di Rajya Sabha (134:33). Anggota yang tidak hadir di Lok Sabha: 23. Sementara di Rajya Sabha 76 anggota. Parlemen lalu menyetujui *Twenty-Eight Amendment to Constitution*, yang membuka mahkamah undang-undang India dari suatu tuduhan bagi keadaan darurat, dan *Twenty-Ninth Amendment* dengan berlaku surut membebaskan perdana menteri dari suatu tuduhan resmi sembari menanti melawannya, juga semua tuduhan yang mungkin dari tindakan-tindakan kriminal sementara menjadi pejabat tinggi, Presiden dan Wakil Presiden, dan Juru Bicara Lok Sabha juga dinyatakan kebal oleh amandemen ini terhadap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, disahkan secara bulat (336:0). Dalam waktu dua puluh empat jam pengesahan keadaan darurat Parlemen, semua badan pembuat undang-undang dengan para menteri Kongres (R), hanya Tamil Nadu dan Gujarat tetap di bawah pemerintahan non Kongres Indira, bertemu dan secara bulat mengesahkan amandemen-amandemen baru. Menurut Jawaharlal Nehru dalam bibliografinya kesatuan dalam penaklukan bukan sesuatu yang membanggakan. Kekuasaan sebuah pemerintahan yang despotik dapat menjadi sebuah beban yang lebih berat untuk rakyat, dan sebuah kekuatan polisi dalam banyak hal berguna, dapat juga sering cukup, berbalik melawan rakyat yang sedianya dilindungi.

Seperti kemerdekaan, demokrasi juga tidak, sebab otokrat biasanya akan berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengikuti jalannya sendiri, kata Indira dalam ulang tahun India yang ke-28. Indira berjanji tidak akan memaksakan pemerintahan satu partai. Kerja keras, visi jelas, kehendak

baja, dan disiplin terpampang di mana saja. Kerja keras adalah cara yang sesuai untuk memberantas kemiskinan.

BANGLADESH SELANJUTNYA

Enam bulan sebelum Indira mengumumkan keadaan darurat, Mujibur Rahman (Wolpert, 1989, p. 401) sudah mengundang Parlemen Bangladesh (Jatiyo Sangad) di Dacca juga untuk mengubah konstitusi, dengan menghapuskan pemerintahan perwakilan sesuai peraturan presiden. Kekalutan ekonomi, korupsi, pencatutan, penimbunan, dan masalah-masalah lain telah membuatnya perlu untuk berdagang di bawah naungan perdana menteri untuk selubung yang lebih komprehensif dari presiden. Perdebatan parlementer adalah barang mewah bagi Bangladesh yang miskin. Dalam banyak hal India benar dan itu sudah lama diterima oleh Pakistan. Demokrasi merupakan suatu proses yang bertele-tele, lamban dan mahal, jauh kurang efisien dari suatu pemerintahan darurat. Tetapi resikonya berat, sebab otokrat biasanya memperoleh suatu pengawasan polisi pribadi istana, yang pada umumnya meningkatkan permusuhan dengan angkatan perang.

Tanggal 24 Agustus 1975 Mujib dan semua anggota keluarganya ditembak mati dalam sebuah *coup d'état* di Dacca dipimpin oleh kesatuan-kesatuan Angkatan Perang Reguler Bangladesh. Mujib sudah berkurang secara ganda dalam ketenarannya oleh tuduhan yang luas tentang korupsi dan atheisme pribadi, beberapa kali terjadi di Dacca selama akhir tahun 1975. Mayor Jendral Zia-ur-Rahman muncul sebagai penyelenggara utama keadaan darurat di Bangladesh. Zia agaknya pro Cina dan Barat dari pada India-Uni Soviet. Tahun 1978 ia merasa yakin akan popularitasnya untuk menyelenggarakan pemilu dan ternyata dengan mudah menjadi Presiden Republik Islamnya. Di samping itu, Zia menjadi Ketua Bangladesh Nasionalist Party. Sebuah Jatiyo Sangad Baru diundang bersidang pada tahun 1979, sementara itu hubungan Dacca-Delhi memburuk, karena sejak Jai Bangla 1971 banyak muncul pertikaian antara India-Bangladesh, misal penggunaan air sungai Gangga, sumber-sumber minyak Teluk Benggala, dan para pelintas perbatasan *illegal*. Tanggal 30 Mei 1981, Zia dibunuh di Chittagong oleh Mayor

Jendral Manzur Ahmend, yang ditangkap dan dibunuh dua hari kemudian. Wakil Presiden Abdus Sattar Presiden Bangladesh, mendesak rakyatnya yang tergoda wabah tragedi untuk tenang dan disiplin.

INDIRA RAJ

Indira menyebut *Emergency Raj Disciplined Democracy* dengan menekankan pentingnya disiplin sebagai sebuah sifat kuno India, kualitas yang memberi kaum yogin kekuatan-kekuatan magis mereka. Ia sendiri adalah seorang yogi taat dan dengan jelas memiliki stamina dan kapasitas luar biasa dari ayahnya untuk bekerja keras. Dari kedua putranya, Sanjay yang lebih muda muncul dalam keadaan darurat sebagai pimpinan Kongres Muda, tokoh kedua yang amat kuat di India.

Indira menyebut *Emergency Raj Disiplined Democracy* dengan menekankan pentingnya disiplin sebagai sebuah sifat kuno India, kualitas yang memberi kaum yoga kekuatan-kekuatan magis mereka. Ia sendiri seorang yogi taat dan dengan jelas memiliki stamina dan kapasitas luar biasa dari ayahnya untuk bekerja keras. Dari kedua putranya, Sanjay yang lebih muda muncul dalam keadaan darurat sebagai pemimpin Kongres Muda, tokoh kedua yang amat kuat di India.

Angin muson tahun 1975 membawa berkat bagi Indira Raj (Wolpert, 1989, p. 401) karena mengakhiri kondisi-kondisi buruk sebelumnya sehingga harga-harga komoditi pokok tetap dapat dipertahankan turun ke tingkat harga tahun 1971. Keadaan darurat sudah memperkecil kerusuhan-kerusuhan seperti peningkatan produktivitas pegawai kantor, peningkatan produksi industri di atas 6% pada tahun 1975 dan 10% pada tahun 1976-1977. Suasana yang teratur dan etos kerja keras menetapkan investasi modal seperti yang tidak pernah ditetapkan sebelumnya, sampai rata-rata 30% selama tahun pertama keadaan darurat. Meskipun tumbuhnya pengaruh Uni Soviet di New Delhi dan makin maraknya kehadiran orang-orang Rusia dan toko-toko buku Uni Soviet di seluruh India, orang-orang Marwari, Parsi dan Gujarat, dan para kapitalis India lainnya dengan jelas tidak merasakan ancaman terhadap keberuntungan mereka atau masa depan usaha-usaha bisnis mereka dari *Indira's Raj*. Inilah sinkretis unik India terhadap

sosialisme dan kapitalisme, dari kegiatan usaha yang didukung oleh negara. Janji perdamaian dan persahabatan 30 tahun Uni Soviet menjamin Indira akan dukungan militer Barat yang diperlukannya, bahkan mungkin untuk menjaga pasukannya sendiri. Pabrik mobil Sanjay yang bergaya Barat dan kepemimpinannya akan elite pengusaha muda India terbukti amat menjamin kembali sektor perbankan dan industri bangsa seolah itu bergerak ke arah sebuah ragam India. Kementerian DMK di Tamil Nadu dijatuhkan pada bulan Februari 1975 oleh Peraturan Presiden atas alasan korupsi. Pemerintah Tamil Nadu telah menjadi pengkritik Indira secara blak-blakan dan DMK hampir telah menyatakan Tamil Nadu sebagai bangsa merdeka mengikuti preseden yang dibuat oleh Bangladesh. Tetapi dalam sebulan setelah pengembalian kekuasaan oleh pemerintah pusat, kebanyakan pemimpin DMK sudah mengundurkan diri dari partai mereka atau ditahan. Di Tamil Nadu, para pemimpin Kongres (O) dan (R) dengan cepat sepakat untuk melupakan perbedaan-perbedaan dan kembali bersatu menyambut Indira kembali ke Madras untuk merestui rekonsiliasi. Pada bulan berikutnya di Gujarat, Kementerian Janata Morsha runtuh akibat adanya pemungutan suara setelah beberapa anggotanya dipikat oleh Kongres Indira. Sebelum keadaan darurat genap setahun oposisi vokal diperkecil. Pemilihan umum yang dijadwalkan pada awal tahun 1976 ditunda untuk tahun berikutnya.

Indira menghendaki sebuah pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Jika harga-harga tetap terkendali, investasi berjalan lancar, dan angin musim tetap bersahabat, maka pemerintah akan menjadi amat populer. Karena kesabaran dan toleransi, rakyat India yang sudah lama menderita telah dibiasakan oleh ribuan tahun dari kelangsungan budaya menerima penguasa sebagai bagian dari tatanan *ialhi* (dharma), undang-undang dan agama digabung. Resi yang bijak dari dunia lama sudah dikenal bahwa sudah banyak yang berubah, tetapi banyak juga yang tetap sama atau pada akhirnya banyak yang kembali dengan pasti siklus untuk apa awalnya mereka itu berada.

Tanggal 18 Januari 1977, Indira membebaskan (Kulke & Ruthermund, 1986, p. 325) para musuh utamanya dan menyatakan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada bulan Maret, dan menunda larangan

terhadap partai-partai politik. Indira yakin bahwa para lawan politiknya tak dapat bangkit kembali dalam waktu demikian singkat dan percaya diri akan popularitas resim otokratiknya, atau ada kemungkinan Indira sedang mempertaruhkan kembali masa depan politiknya berlandaskan pemungutan suara yang demokratik di India.

Dalam waktu semalaman, Morarji dan Janata Party menghidupkan kembali Janata Morcha. Dua minggu kemudian, Jagjivan Ram, Menteri Pertahanan India sebelumnya dan *ex untouchable* India kenamaan, mengundurkan diri dari Kabinet Indira dan Kongresnya untuk membentuk Kongresnya sendiri untuk demokrasi, dan mempersekutukannya dengan Janata. Oposisi bersatu ini memberi para pemilih India janji kebebasan dan roti. Janata Party menyatakan bahwa pemilu 1977 adalah untuk memilih demokrasi atau kediktatoran dan kemerdekaan atau perbudakan. Sementara itu pelaksanaan KB di UP dan kota-kota Bihar, telah meresahkan kaum petani, yang memandang kediktatoran Madam merampas kemampuan dan keturunan. Ijin perkemungan kumuh yang keras di sekitar masjid Besar Delhi lama juga membuat banyak orang Muslim kelas bawah, yang secara tradisional mendukung Indira tidak percaya akan kebijakan atau kebaikan dari pemerintahannya. Pemilu tahun 1977 dimenangkan oleh Janata Party, sehingga dengan demikian mengakhiri 30 tahun pemerintahan Kongres secara berturut-turut. Morarji Desai menjadi Perdana Menteri India ke-4. Jagjivan Ram yang ingin dipilih menjadi perdana menteri dicegah oleh Janata Party. Pada akhir bulan April 1977 karir politik Indira sudah berakhir. Indira dan Sanjay harus turun dari panggung politik.

PENUTUP

Pasca merdeka India dan Pakistan terlibat dalam peperangan sebanyak tiga kali, yaitu Perang Kashmir I dan Perang Kashmir II. Perang Kashmir I dan II sangat diwarnai oleh alasan ideologis keagamaan sementara perang yang ketiga lebih mencerminkan betapa rapuhnya alasan ideologis keagamaan itu untuk mewujudkan kesetiaan Islam dalam kepemimpinan Pakistan, dalam hal ini kepemimpinan Pakistan Barat. Lahirnya Pakistan dan India merupakan perwujudan dari

nasionalisme yang di India lebih dengan teguh untuk mempertahankan kesatuan India pasca mudurnya Inggris dan kawasan Asia Selatan, sementara Pakistan lebih dibayangi oleh ancaman mayoritas terhadap minoritas. Di samping itu para pendiri Pakistan lebih dibayangi oleh masa silam keberadaan kaum Muslim India sebagai kelompok penguasa sejak kehadiran mereka di kawasan itu. Hakekat demokrasi sebagai manifestasi mayoritas yang berkuasa sangat menghantui eksistensi kaum Muslim di belantara mayoritas kaum Hindu. Kaum Muslim bukannya alergi terhadap demokrasi, tetapi mereka ketakutan akan penerapannya di Asia Selatan. Sebelumnya, ketika mereka belum dikuasai oleh Inggris, mereka adalah kelas penguasa, nanti bila Inggris meninggalkan Asia Selatan kaum Muslim akan berada di bawah kaum Hindu. Perang India-Pakistan menyingkap tabir bahwa ide Muhammad Ali Jinnah untuk menyatukan kaum Muslim India Inggris yang berserakan itu ternyata tidak bertahan lama (1947-1971). Berdirinya Bangladesh pada tahun 1972 telah memupus eksistensi kesatuan kaum Muslim, dan lebih sesuai dengan ide Muhammad Iqbal, yaitu wilayah barat laut India-Inggris, yang dikenal dengan sebutan Republik Islam Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnds, William J., 1972, *India, Pakistan, and the Great Powers*, New York, Praeger Publishers.
- Burki, Shahid Javed, 1986, *Pakistan, The Continuing Search for Nationhood*, Lahore, Pak Book Corporation.
- Ganguly, Sumit, 1986, *The Origins of War in South Asia, Indo-Pakistani Conflicts Since 1947*, London, Westview Press.
- Kulke, Hermann & Rothermund, Dietmar, 1986, *A History of India*, New Jersey, Barnes & Noble Books.
- Mahmud, S.F., 1988, *A Concise History of Indo-Pakistan*, Oxford, Oxford University Press.
- Wolpert, Stanley, 2009, *A New History of India*, Oxford, Oxford University Press.

